



Evaluasi Pembayaran Berkala Terhadap Efisiensi Customs Clearance Pada Perusahaan Manufaktur

Evaluation of Periodic Payments on Customs Clearance Efficiency in Manufacturing Companies

Abdul Najib

Logistik Bisnis, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi fasilitas pembayaran berkala terhadap efisiensi proses customs clearance impor pada PT YKK AP Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif dengan dukungan data kuantitatif administratif. Model evaluasi yang digunakan adalah Context, Input, Process, Product (CIPP) untuk menilai kebutuhan implementasi, kesiapan perusahaan, perubahan proses, serta hasil yang diperoleh setelah penerapan pembayaran berkala. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf impor dan staf accounting, observasi proses customs clearance, serta dokumentasi internal berupa data waktu penyelesaian impor, dokumen PIB, alur kerja, dan laporan biaya penyimpanan di pelabuhan. Periode data sebelum implementasi mencakup April 2024 sampai Maret 2025, sedangkan periode setelah implementasi mencakup April 2025 sampai Agustus 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran berkala menyederhanakan alur customs clearance dengan memisahkan proses pembayaran pajak impor dari penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Rata-rata waktu customs clearance menurun dari 2,86 hari kerja menjadi 0,63 hari kerja, atau mengalami efisiensi sebesar 77,97%. Selain itu, perusahaan memperoleh penghematan biaya penyimpanan di pelabuhan sebesar Rp27.371.008 selama periode April sampai Agustus 2025. Namun, implementasi fasilitas ini juga menimbulkan kebutuhan penguatan pengendalian internal, terutama terkait monitoring jatuh tempo pembayaran, penyusunan SOP khusus, rekonsiliasi data PIB, dan penetapan KPI customs clearance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembayaran berkala berkontribusi positif terhadap efisiensi customs clearance, tetapi keberlanjutan efektivitasnya bergantung pada koordinasi antarbagian dan disiplin pengendalian pembayaran.

Kata kunci: Pembayaran Berkala; Customs Clearance; MITA Kepabeanan, Efisiensi Logistik, CIPP

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the periodic payment facility on the efficiency of the import customs clearance process at PT YKK AP Indonesia. The study employs a descriptive evaluative qualitative approach supported by administrative quantitative data. The evaluation model used is Context, Input, Process, Product (CIPP), which assesses the implementation needs, company readiness, process changes, and outcomes resulting from the periodic payment facility. Data were collected through interviews with import and accounting staff, observation of the customs clearance process, and internal documentation, including import clearance time records, Import Declaration documents (PIB), workflow documents, and port storage cost reports. The pre-implementation period covers April 2024 to March 2025, while the post-implementation period covers April 2025 to August 2025. The results show that the periodic payment facility simplifies the customs clearance workflow by separating import tax payment from the issuance of the Goods Release Approval Letter (SPPB). The average customs clearance time decreased from 2.86 working days to 0.63 working days, representing an efficiency improvement of 77.97%. In addition, the company achieved port storage cost savings of IDR 27,371,008 during the period from April to August 2025. However, the implementation of this facility also requires stronger internal control, particularly in monitoring payment due dates, establishing specific standard operating procedures, reconciling PIB data, and setting customs clearance performance indicators. This study concludes that periodic payment contributes positively to customs clearance efficiency, although its sustained effectiveness depends on interdepartmental coordination and payment control discipline.

Keywords: Periodic Payment; Customs Clearance; MITA Customs; Logistics Efficiency; CIPP

How to cite: Najib, A. (2026). Evaluasi Pembayaran Berkala Terhadap Efisiensi Customs Clearance Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBI)*, 7(1) 2026: 110-120

*E-mail: abdunajibbb@gmail.com

ISSN 2774 - 3004 (Online)



PENDAHULUAN

Kinerja logistik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung daya saing perdagangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Efisiensi logistik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh efektivitas prosedur administrasi, koordinasi antarinstansi, serta kecepatan penyelesaian dokumen dalam arus barang lintas negara (Firdausy, 2021; Priyajati & Haryanto, 2020). Dalam konteks perdagangan internasional, proses kepabeanan memiliki peran strategis karena menjadi salah satu titik kritis yang menentukan kelancaran impor dan ekspor (Ibrahim & Halkam, 2021). Gani (2017), Hammadi et al. (2020), dan Bank (2018) menegaskan bahwa kinerja logistik berkaitan erat dengan kemampuan suatu negara atau pelaku usaha dalam mengelola proses pergerakan barang secara cepat, terukur, dan efisien. Salah satu komponen penting dalam kinerja logistik tersebut adalah efisiensi penyelesaian kepabeanan dan pengelolaan perbatasan.

Efisiensi dalam penyelesaian kepabeanan menjadi semakin penting karena keterlambatan proses customs clearance dapat menimbulkan konsekuensi operasional dan finansial bagi perusahaan. Customs clearance pada dasarnya merupakan rangkaian proses administrasi dan kepabeanan yang dilakukan untuk memperoleh persetujuan pengeluaran barang impor, mulai dari penyiapan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), penyampaian data ke sistem kepabeanan, penerbitan respons kepabeanan, penyelesaian kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor, pemeriksaan apabila diperlukan, hingga penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) (Febriana et al., 2025; Rubiyanto, 2021a). Dalam praktik bisnis, semakin lama proses customs clearance berlangsung, semakin besar pula potensi biaya tambahan seperti biaya penyimpanan, demurrage, keterlambatan produksi, serta gangguan terhadap kelancaran rantai pasok. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur kepabeanan menjadi salah satu agenda penting dalam peningkatan efisiensi logistik dan fasilitasi perdagangan.

Secara internasional, kebutuhan penyederhanaan prosedur kepabeanan telah menjadi bagian dari agenda trade facilitation. World Trade Organization Trade Facilitation Agreement, khususnya Article 7, mendorong negara anggota untuk memberikan kemudahan tambahan kepada operator yang memenuhi kriteria tertentu (Rabbani, 2021; Ukas et al., 2023). Prinsip serupa juga terdapat dalam Revised Kyoto Convention yang menekankan pentingnya penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan. Bentuk fasilitasi tersebut dapat mencakup percepatan pengeluaran barang, pengurangan intensitas pemeriksaan fisik dan dokumen, penggunaan jaminan perusahaan, serta penundaan atau pengaturan ulang mekanisme pembayaran bea masuk dan pajak impor. Dengan demikian, trade facilitation tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada penciptaan proses logistik yang lebih efisien, prediktif, dan rendah hambatan (Kusnandar & SH, n.d.).

Di Indonesia, implementasi fasilitasi perdagangan antara lain diwujudkan melalui fasilitas Mitra Utama Kepabeanan atau MITA Kepabeanan. Berdasarkan PMK No. 128 Tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan, MITA Kepabeanan diberikan kepada importir dan/atau eksportir yang memenuhi persyaratan tertentu dan dinilai memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Fasilitas ini memberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan, antara lain pengurangan intensitas pemeriksaan, layanan client coordinator, penggunaan corporate guarantee, serta fasilitas pembayaran berkala. Dalam perspektif manajemen logistik, fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif, mempercepat arus barang, dan meningkatkan kepastian proses impor.

Salah satu fasilitas penting dalam skema MITA Kepabeanan adalah pembayaran berkala atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Fasilitas pembayaran berkala memungkinkan perusahaan menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam periode tertentu, bukan secara langsung pada setiap transaksi impor sebelum proses pengeluaran barang. Secara operasional, fasilitas ini berpotensi mengurangi ketergantungan antara proses pembayaran pajak dan penerbitan SPPB (Berata, 2014; Hardi Fardiansyah et al., 2023). Dengan berkurangnya ketergantungan tersebut, proses customs clearance dapat berjalan lebih cepat karena pengeluaran barang tidak lagi tertahan oleh proses pembayaran manual, cut-off time perbankan, maupun tahapan persetujuan internal perusahaan. Namun, fasilitas ini juga menimbulkan kebutuhan pengendalian baru, terutama terkait monitoring jatuh tempo pembayaran, koordinasi antara

bagian impor dan accounting, serta kepastian kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan (Rubiyanto, 2021b; Sarumaha & Rangkuti, 2022).

PT YKK AP Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang telah memperoleh status MITA Kepabeanan sejak tahun 2017. Meskipun telah memperoleh fasilitas kepabeanan, data internal perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata waktu customs clearance impor pada tahun 2024 masih mencapai 22 jam 53 menit 39 detik atau setara dengan 2,86 hari kerja per dokumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas kepabeanan dan realisasi efisiensi operasional di tingkat perusahaan. Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap kondisi tersebut antara lain proses pembayaran pajak impor yang masih dilakukan secara manual, proses persetujuan internal yang berlapis, adanya cut-off time pembayaran harian, koordinasi yang belum sepenuhnya terjadwal antara bagian impor dan accounting, serta belum tersedianya indikator kinerja utama yang secara khusus mengukur efisiensi waktu customs clearance.

Sejak April 2025, PT YKK AP Indonesia mulai mengimplementasikan fasilitas pembayaran berkala dalam proses impor. Perubahan ini menjadi penting untuk dievaluasi karena pembayaran berkala tidak hanya mengubah mekanisme penyelesaian kewajiban pajak, tetapi juga mengubah alur kerja customs clearance secara keseluruhan. Jika sebelumnya pembayaran pajak menjadi salah satu prasyarat utama sebelum penerbitan SPPB, maka melalui fasilitas pembayaran berkala proses pengeluaran barang dapat dilakukan lebih cepat dengan kewajiban pembayaran yang diselesaikan secara periodik. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi untuk memahami bagaimana fasilitas ini diimplementasikan, sejauh mana perubahan tersebut berkaitan dengan efisiensi waktu customs clearance, serta risiko pengendalian apa yang muncul setelah fasilitas diterapkan.

Penelitian terdahulu mengenai MITA Kepabeanan telah memberikan kontribusi penting, tetapi sebagian besar masih membahas fasilitas MITA secara umum. NUR (2020), misalnya, meneliti optimalisasi fasilitas MITA Kepabeanan dalam menunjang ketepatan waktu customs clearance barang impor di PT Krakatau Steel. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fasilitas MITA dapat mendukung percepatan proses impor, tetapi fokusnya masih pada penggunaan fasilitas MITA secara umum dan kendala koordinasi internal. Rinaldi et al. (2022) mengevaluasi kebijakan MITA Kepabeanan menggunakan model Context, Input, Process, Product dan menemukan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan sesuai tujuan, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya dan pelayanan. Sementara itu, Sukarno & Sentana (2024) menganalisis pelayanan khusus terhadap predikat MITA Kepabeanan dan menekankan pentingnya evaluasi terhadap aspek efektivitas, efisiensi, serta ketepatan implementasi kebijakan.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengevaluasi fasilitas pembayaran berkala sebagai salah satu instrumen MITA Kepabeanan yang berdampak langsung pada alur customs clearance di tingkat perusahaan. Kesenjangan penelitian terletak pada belum banyaknya kajian yang menghubungkan implementasi pembayaran berkala dengan perubahan waktu customs clearance, penghematan biaya logistik, serta risiko pengendalian internal di perusahaan manufaktur. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang lebih spesifik, yaitu mengevaluasi pembayaran berkala sebagai fasilitas operasional yang dapat memengaruhi efisiensi proses impor, bukan sekadar menilai MITA Kepabeanan sebagai kebijakan umum.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, Product atau CIPP untuk menilai implementasi pembayaran berkala secara komprehensif. Model CIPP dipilih karena mampu mengevaluasi tidak hanya hasil akhir, tetapi juga latar belakang kebutuhan, kesiapan sumber daya, mekanisme pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan dari suatu program atau kebijakan. Pada aspek context, penelitian ini menilai kebutuhan perusahaan terhadap fasilitas pembayaran berkala. Pada aspek input, penelitian ini mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, sistem, dokumen, dan dukungan manajemen. Pada aspek process, penelitian ini menganalisis perubahan alur customs clearance serta koordinasi antarbagian. Pada aspek product, penelitian ini menilai perubahan waktu customs clearance, penghematan biaya penyimpanan, dan risiko yang muncul setelah implementasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitas pembayaran berkala di PT YKK AP Indonesia, mengevaluasi perubahan efisiensi proses customs

clearance setelah fasilitas tersebut diterapkan, serta mengidentifikasi hambatan dan risiko pengendalian yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam menyusun mekanisme pengendalian pembayaran berkala, penyusunan standar operasional prosedur, dan pengembangan indikator kinerja customs clearance. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai trade facilitation, manajemen kepabeanan, dan evaluasi efisiensi logistik pada tingkat perusahaan manufaktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif dengan dukungan data kuantitatif administratif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami implementasi fasilitas pembayaran berkala dalam proses customs clearance secara mendalam, sedangkan pendekatan deskriptif evaluatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan, kesiapan, pelaksanaan, dan hasil implementasi fasilitas tersebut. Model evaluasi yang digunakan adalah Context, Input, Process, Product atau CIPP, karena model ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari latar belakang kebutuhan program, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga dampak yang dihasilkan terhadap efisiensi customs clearance.

Penelitian dilakukan pada PT YKK AP Indonesia, perusahaan manufaktur yang telah memperoleh fasilitas Mitra Utama Kepabeanan. Objek penelitian adalah implementasi fasilitas pembayaran berkala dalam proses customs clearance impor, khususnya pada tahapan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Data yang digunakan mencakup periode sebelum implementasi, yaitu April 2024 sampai Maret 2025, dan periode setelah implementasi, yaitu April 2025 sampai Agustus 2025. Waktu customs clearance dalam penelitian ini didefinisikan sebagai durasi sejak dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diproses melalui sistem kepabeanan sampai dengan terbitnya SPPB, dengan satuan analisis berupa jam dan hari kerja.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi proses customs clearance serta wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam proses impor dan pembayaran pajak impor, terutama staf impor dan staf accounting. Informan dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyusunan dokumen PIB, koordinasi pembayaran, monitoring jatuh tempo, dan proses penerbitan SPPB. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan, antara lain data waktu customs clearance, dokumen PIB, alur kerja sebelum dan sesudah pembayaran berkala, dokumen instruksi kerja impor, serta laporan biaya penyimpanan di pelabuhan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan komponen CIPP: context untuk menilai kebutuhan penerapan pembayaran berkala, input untuk menilai kesiapan sumber daya dan sistem, process untuk menilai perubahan alur kerja dan mekanisme pelaksanaan, serta product untuk menilai perubahan waktu clearance, penghematan biaya, dan risiko operasional.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi, serta penarikan kesimpulan. Efisiensi waktu customs clearance dihitung dengan membandingkan rata-rata waktu sebelum dan sesudah implementasi menggunakan rumus: $((\text{rata-rata waktu sebelum implementasi} - \text{rata-rata waktu sesudah implementasi}) / \text{rata-rata waktu sebelum implementasi}) \times 100\%$. Dengan rumus tersebut, penurunan waktu dari 2,86 hari kerja menjadi 0,63 hari kerja digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi proses. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen internal perusahaan. Penelitian ini dibatasi pada studi kasus di satu perusahaan manufaktur dan periode pasca-implementasi yang relatif pendek, sehingga hasilnya diposisikan sebagai evaluasi awal yang relevan bagi perusahaan dengan karakteristik proses impor sejenis, bukan sebagai generalisasi untuk seluruh penerima fasilitas MITA Kepabeanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Data dan Dasar Evaluasi Implementasi Pembayaran Berkala

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari PT YKK AP Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf impor dan staf accounting serta observasi terhadap proses customs clearance impor. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan, meliputi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), alur kerja customs clearance, data waktu penyelesaian impor, serta laporan biaya penyimpanan di pelabuhan. Penggunaan beberapa sumber data tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi fasilitas pembayaran berkala, baik dari sisi proses operasional maupun dampaknya terhadap efisiensi customs clearance.

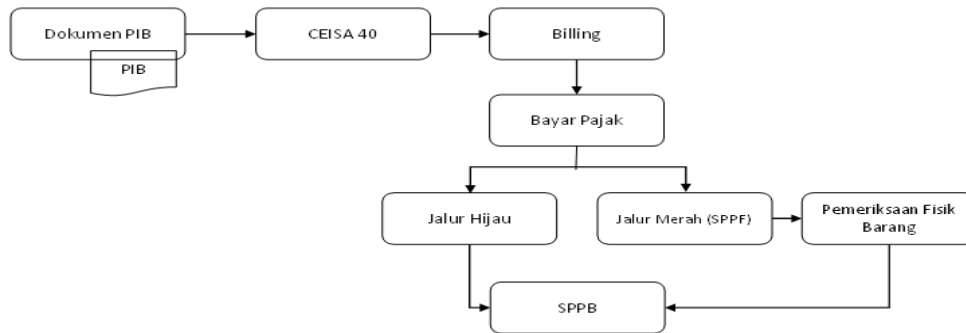
Periode data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu periode sebelum dan sesudah implementasi fasilitas pembayaran berkala. Periode sebelum implementasi mencakup April 2024 sampai Maret 2025, sedangkan periode setelah implementasi mencakup April 2025 sampai Agustus 2025. Pembagian periode ini digunakan untuk membandingkan kondisi proses customs clearance sebelum dan setelah perusahaan menerapkan pembayaran berkala. Perbandingan tersebut tidak hanya dilihat dari rata-rata waktu penyelesaian customs clearance, tetapi juga dari perubahan alur kerja, mekanisme koordinasi antara bagian impor dan accounting, serta dampak biaya yang muncul akibat proses penyimpanan barang di pelabuhan.

Dasar evaluasi dalam penelitian ini menggunakan model Context, Input, Process, Product (CIPP). Model ini digunakan untuk menilai implementasi pembayaran berkala secara komprehensif. Aspek context digunakan untuk menganalisis kebutuhan perusahaan terhadap fasilitas pembayaran berkala, khususnya dalam mengatasi hambatan pembayaran pajak impor yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berulang. Aspek input digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem, dokumen, maupun dukungan manajemen. Aspek process digunakan untuk mengevaluasi perubahan mekanisme customs clearance setelah pembayaran berkala diterapkan. Sementara itu, aspek product digunakan untuk menilai hasil implementasi, terutama perubahan waktu customs clearance, penghematan biaya penyimpanan, serta risiko operasional yang muncul setelah penerapan fasilitas tersebut.

Berdasarkan data awal perusahaan, sebelum implementasi pembayaran berkala proses customs clearance masih menghadapi hambatan pada tahapan pembayaran bea masuk dan pajak impor. Pembayaran pajak yang dilakukan per transaksi menyebabkan proses pengeluaran barang bergantung pada kesiapan pembayaran, persetujuan internal, serta batas waktu layanan pembayaran. Kondisi ini berpotensi memperpanjang waktu penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan menambah biaya logistik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pembayaran berkala menjadi penting untuk mengetahui apakah fasilitas tersebut mampu mengurangi hambatan administratif, mempercepat pengeluaran barang, serta meningkatkan efisiensi proses impor di perusahaan.

2. Perubahan Alur Customs Clearance Sebelum dan Sesudah Pembayaran Berkala

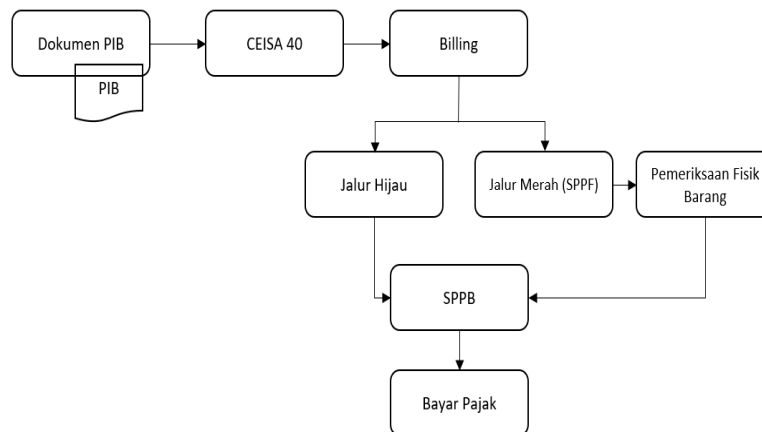
Implementasi fasilitas pembayaran berkala membawa perubahan utama pada alur customs clearance impor, khususnya pada hubungan antara penyelesaian pembayaran bea masuk dan pajak impor dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Sebelum fasilitas pembayaran berkala diterapkan, pembayaran pajak impor menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses customs clearance dapat berlanjut sampai pada penerbitan SPPB. Dengan demikian, kecepatan pengeluaran barang sangat dipengaruhi oleh kesiapan pembayaran, proses persetujuan internal, serta waktu layanan pembayaran melalui bank.



Gambar 1. Alur Kerja Proses Customs Clearance Sebelum Penerapan Pembayaran Pajak Berkala
 Sumber: Diolah penulis, 2025, dari dokumen Instruksi Kerja Customs Clearance Impor PT YKK AP Indonesia

Berdasarkan Gambar 1, proses customs clearance sebelum penerapan pembayaran berkala dimulai dari penyusunan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh bagian impor. Setelah dokumen PIB lengkap, data dikirim melalui sistem CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperoleh respons berupa kode billing pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pada mekanisme ini, kode billing yang telah diterbitkan harus segera ditindaklanjuti melalui pembayaran oleh bagian finance atau accounting sebelum proses dapat dilanjutkan menuju penerbitan SPPB.

Tahapan pembayaran tersebut menjadi titik kritis karena masih bergantung pada proses internal perusahaan dan mekanisme pembayaran ke bank. Apabila terdapat keterlambatan dalam pengajuan pembayaran, persetujuan internal, atau keterbatasan waktu layanan pembayaran, maka proses customs clearance ikut tertunda. Pada kondisi jalur hijau, keterlambatan pembayaran dapat menunda penerbitan SPPB meskipun barang tidak memerlukan pemeriksaan fisik. Pada kondisi jalur merah, proses menjadi lebih panjang karena barang tetap harus melalui pemeriksaan fisik sebelum SPPB diterbitkan. Dengan demikian, sebelum pembayaran berkala diterapkan, pembayaran pajak impor menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat arus pengeluaran barang dari pelabuhan.



Gambar 2. Alur Kerja Proses Customs Clearance Setelah Penerapan Pembayaran Pajak Berkala
 Sumber: Diolah penulis, 2025, dari dokumen Instruksi Kerja Customs Clearance Impor PT YKK AP Indonesia

Berdasarkan Gambar 2, alur customs clearance setelah penerapan pembayaran berkala mengalami penyederhanaan pada tahapan pembayaran pajak impor. Bagian impor tetap menyusun dokumen PIB dan mengirimkan data melalui sistem CEISA 4.0. Namun, setelah kode billing diterbitkan, proses kepabeanan dapat berlanjut tanpa harus menunggu pelunasan pembayaran pajak per transaksi. Dengan mekanisme ini, sistem Bea dan Cukai dapat memberikan respons penjaluran dan proses penerbitan SPPB dapat berjalan lebih cepat sesuai hasil penjaluran.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran berkala memisahkan waktu pembayaran pajak dari waktu pengeluaran barang. Kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi, tetapi penyelesaiannya dilakukan secara periodik sesuai ketentuan fasilitas yang digunakan

perusahaan. Dalam konteks PT YKK AP Indonesia, pembayaran dilakukan secara berkala pada tanggal yang telah ditentukan, sehingga bagian impor dan accounting memiliki jadwal koordinasi yang lebih terstruktur. Mekanisme ini mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya muncul akibat pembayaran per transaksi dan mempercepat proses pengeluaran barang, terutama pada impor yang memperoleh jalur hijau.

Secara keseluruhan, perbandingan antara Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa perubahan utama bukan terletak pada penghapusan kewajiban pembayaran pajak, melainkan pada perubahan waktu penyelesaiannya. Sebelum implementasi, pembayaran menjadi prasyarat penting sebelum SPPB diterbitkan. Setelah implementasi, pembayaran dilakukan secara berkala sehingga customs clearance tidak lagi tertahan oleh proses pembayaran per dokumen PIB. Perubahan ini sejalan dengan prinsip fasilitas MITA Kepabeanan, yaitu memberikan pelayanan khusus kepada perusahaan yang memenuhi kriteria kepatuhan untuk mempercepat pengeluaran barang dan mengurangi hambatan dalam rantai pasok.

3. Komparasi Efisiensi Customs Clearance Sebelum dan Sesudah Pembayaran Berkala

Perubahan alur kerja setelah penerapan fasilitas pembayaran berkala berdampak pada efisiensi proses customs clearance di PT YKK AP Indonesia. Efisiensi tersebut dapat dilihat dari perubahan mekanisme pembayaran pajak impor, pola koordinasi antara bagian impor dan accounting, penurunan rata-rata waktu customs clearance, serta penghematan biaya penyimpanan di pelabuhan. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi pembayaran berkala disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Waktu Customs Clearance Sebelum dan Setelah Penerapan Pembayaran Pajak Impor Berkala

Aspek yang Dinilai	Sebelum Pembayaran Berkala (April 2024 - Maret 2025)	Sesudah Pembayaran Berkala (April 2025 - Agustus 2025)	Dampak Positif	Dampak Negatif
Proses Pembayaran Pajak Impor	Manual – staf impor datang langsung ke bank untuk setor pajak; waktu ±2 jam per transaksi	Pembayaran dilakukan secara berkala	Waktu dan tenaga lebih efisien; tidak perlu perjalanan ke bank setiap transaksi	Risiko keterlambatan pembayaran apabila monitoring jatuh tempo tidak dilakukan dengan baik
Koordinasi Accounting	Impor- Tidak terjadwal; pembayaran dilakukan setiap ada PIB keluar	Pembayaran dilakukan setiap tanggal 15	Alur kerja lebih teratur dan mudah dikontrol	Ketergantungan pada koordinasi antar bagian; keterlambatan input data PIB dapat menyebabkan pembayaran terlewat
Waktu Rata-rata Customs Clearance	2,86 hari kerja	0,63 hari kerja	Ada penurunan waktu <i>customs clearance</i> 2,23 hari atau turun 77,97% dari tahun buku 2024, penghematan biaya	Risiko pencabutan fasilitas pembayaran berkala apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak

Berdasarkan Tabel 1, perubahan paling mendasar terjadi pada proses pembayaran pajak impor. Sebelum pembayaran berkala diterapkan, pembayaran dilakukan secara manual dan per transaksi, sehingga setiap dokumen PIB yang telah memperoleh kode billing harus segera ditindaklanjuti melalui proses pembayaran. Pola ini menyebabkan waktu customs clearance sangat bergantung pada kesiapan bagian internal perusahaan dalam melakukan pembayaran. Selain itu, proses manual juga menimbulkan penggunaan waktu dan tenaga yang tidak efisien karena staf harus melakukan pembayaran setiap kali terdapat kewajiban pajak impor yang harus diselesaikan.

Setelah pembayaran berkala diterapkan, proses pembayaran tidak lagi dilakukan pada setiap transaksi impor, tetapi dijadwalkan secara periodik. Perubahan ini membuat koordinasi antara bagian impor dan accounting menjadi lebih teratur karena kewajiban pembayaran dapat dikumpulkan dan diselesaikan pada waktu tertentu. Dari sisi operasional, mekanisme ini membantu perusahaan mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya mengganggu kelancaran proses customs clearance. Namun, perubahan tersebut juga menuntut perusahaan memiliki sistem monitoring yang lebih disiplin agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Dari sisi waktu, penerapan pembayaran berkala menunjukkan penurunan rata-rata waktu customs clearance dari 2,86 hari kerja menjadi 0,63 hari kerja. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar 2,23 hari kerja. Berdasarkan rumus efisiensi, yaitu selisih waktu sebelum dan sesudah implementasi dibagi waktu sebelum implementasi, penurunan tersebut setara dengan efisiensi sebesar 77,97%. Temuan ini menunjukkan bahwa pembayaran berkala berkontribusi terhadap percepatan proses pengeluaran barang karena SPPB dapat diterbitkan tanpa menunggu penyelesaian pembayaran pajak per transaksi.

Selain berdampak pada efisiensi waktu, penerapan pembayaran berkala juga memberikan dampak terhadap biaya logistik. Selama periode April sampai Agustus 2025, perusahaan mencatat penghematan biaya penyimpanan di pelabuhan sebesar Rp27.371.008. Penghematan ini menunjukkan bahwa percepatan customs clearance tidak hanya penting dari sisi kelancaran operasional, tetapi juga berpengaruh terhadap pengendalian biaya logistik perusahaan. Semakin cepat barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan, semakin kecil potensi biaya penyimpanan yang harus ditanggung perusahaan.

Meskipun demikian, hasil pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa pembayaran berkala tidak sepenuhnya menghilangkan risiko operasional. Risiko utama bergeser dari keterlambatan pengeluaran barang akibat pembayaran per transaksi menjadi risiko kepatuhan terhadap jatuh tempo pembayaran berkala. Apabila perusahaan tidak memiliki sistem kontrol internal yang kuat, keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada sanksi administratif atau bahkan pencabutan fasilitas. Oleh karena itu, efisiensi yang diperoleh dari pembayaran berkala perlu diimbangi dengan penguatan SOP, monitoring jatuh tempo, rekonsiliasi data PIB, serta koordinasi yang konsisten antara bagian impor dan accounting.

4. Temuan Evaluasi Berdasarkan Model CIPP

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf accounting dan staf impor, observasi proses customs clearance, serta pengolahan data internal perusahaan, diperoleh temuan evaluatif sebagai berikut.

1. Dari aspek context, fasilitas pembayaran berkala dibutuhkan untuk mengatasi proses pembayaran pajak impor yang sebelumnya bersifat manual, repetitif, dan kurang efisien. Sebelum implementasi, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor masih

dilakukan per transaksi setelah kode billing diterbitkan. Mekanisme ini menyebabkan proses customs clearance bergantung pada kesiapan pembayaran, persetujuan internal, serta waktu layanan bank. Apabila terjadi keterlambatan pada salah satu tahapan tersebut, penerbitan SPPB dan pengeluaran barang juga berpotensi tertunda. Dengan demikian, fasilitas pembayaran berkala menjadi kebutuhan operasional untuk mengurangi hambatan administratif, mempercepat pengeluaran barang, dan mendukung kelancaran rantai pasok perusahaan.

2. Dari aspek input, PT YKK AP Indonesia telah memiliki kesiapan dasar dalam menerapkan fasilitas pembayaran berkala. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui status perusahaan sebagai penerima fasilitas MITA Kepabeanan, ketersediaan sumber daya manusia pada bagian impor dan accounting, penggunaan sistem CEISA 4.0 dalam proses kepabeanan, serta adanya dukungan manajemen untuk mempercepat proses impor. Selain itu, koordinasi antara bagian impor dan accounting telah berjalan dalam pelaksanaan pembayaran berkala. Namun demikian, perusahaan belum memiliki Standar Operasional Prosedur khusus yang mengatur mekanisme pembayaran berkala secara rinci. Perusahaan juga belum memiliki Indikator Kinerja Utama yang secara spesifik mengukur efisiensi waktu customs clearance. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan input sudah cukup memadai, tetapi masih perlu diperkuat melalui sistem pengendalian internal yang lebih formal dan terukur.
3. Dari aspek process, implementasi pembayaran berkala membawa perubahan signifikan pada alur customs clearance, terutama pada tahapan pembayaran pajak impor. Dengan mekanisme baru, SPPB dapat diterbitkan tanpa menunggu pelunasan bea masuk dan pajak impor per transaksi, sehingga proses pengeluaran barang menjadi lebih cepat. Selama periode penelitian, implementasi pembayaran berkala berjalan melalui koordinasi antara bagian impor dan accounting serta mekanisme kontrol internal perusahaan. Tidak ditemukan keterlambatan pembayaran selama periode pengamatan, sehingga fasilitas dapat dimanfaatkan tanpa mengganggu kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kepabeanan. Temuan ini sejalan dengan konsep MITA Kepabeanan sebagai bentuk pelayanan khusus yang bertujuan mempercepat pengeluaran barang dan mengurangi hambatan administratif dalam proses impor.
4. Dari aspek product, implementasi pembayaran berkala memberikan dampak positif terhadap efisiensi customs clearance. Rata-rata waktu customs clearance menurun dari 2,86 hari kerja menjadi 0,63 hari kerja, atau turun sebesar 2,23 hari kerja. Berdasarkan perhitungan efisiensi, penurunan tersebut setara dengan 77,97%. Selain itu, implementasi pembayaran berkala memberikan penghematan biaya penyimpanan di pelabuhan sebesar Rp27.371.008 selama periode April sampai Agustus 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa pembayaran berkala tidak hanya mempercepat proses pengeluaran barang, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian biaya logistik perusahaan. Namun, dampak positif tersebut perlu dijaga melalui monitoring jatuh tempo pembayaran, rekonsiliasi data PIB, penyusunan SOP, serta penetapan KPI customs clearance agar efisiensi yang dicapai dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi CIPP menunjukkan bahwa fasilitas pembayaran berkala relevan dengan kebutuhan PT YKK AP Indonesia dalam mempercepat proses customs clearance. Dari sisi context, fasilitas ini menjawab permasalahan pembayaran manual yang menghambat pengeluaran barang. Dari sisi input, perusahaan telah memiliki kesiapan dasar, tetapi masih perlu memperkuat SOP dan indikator kinerja. Dari sisi process, pembayaran berkala menyederhanakan alur customs clearance dengan memisahkan waktu pembayaran pajak dari penerbitan SPPB. Dari sisi product, fasilitas ini memberikan efisiensi waktu dan penghematan biaya, meskipun tetap memunculkan risiko baru yang harus dikendalikan melalui sistem kontrol internal yang lebih kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan kondisi data dan dasar evaluasi, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fasilitas pembayaran berkala di PT YKK AP Indonesia perlu dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi proses customs clearance impor. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan periode sebelum implementasi, yaitu April 2024 sampai Maret 2025, dan periode setelah implementasi, yaitu April 2025 sampai Agustus 2025. Data wawancara, observasi, serta

dokumen internal perusahaan menunjukkan bahwa hambatan utama sebelum implementasi terletak pada proses pembayaran pajak impor yang masih dilakukan per transaksi, sehingga proses penerbitan SPPB sangat bergantung pada kesiapan pembayaran dan koordinasi internal perusahaan.

Dari sisi perubahan alur customs clearance, penerapan pembayaran berkala terbukti menyederhanakan tahapan proses impor. Sebelum implementasi, pembayaran bea masuk dan pajak impor menjadi prasyarat penting sebelum proses dapat berlanjut menuju penerbitan SPPB. Setelah fasilitas pembayaran berkala diterapkan, proses customs clearance dapat berjalan tanpa menunggu pelunasan pajak per transaksi karena kewajiban pembayaran diselesaikan secara periodik. Perubahan ini membuat proses pengeluaran barang menjadi lebih cepat dan lebih terstruktur, terutama karena koordinasi antara bagian impor dan accounting dapat dilakukan berdasarkan jadwal pembayaran yang lebih pasti.

Dari sisi efisiensi, implementasi pembayaran berkala memberikan dampak positif terhadap waktu customs clearance dan biaya logistik perusahaan. Rata-rata waktu customs clearance menurun dari 2,86 hari kerja menjadi 0,63 hari kerja, atau berkurang sebesar 2,23 hari kerja dengan tingkat efisiensi sebesar 77,97%. Selain itu, percepatan proses pengeluaran barang juga berkontribusi pada penghematan biaya penyimpanan di pelabuhan sebesar Rp27.371.008 selama periode April sampai Agustus 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa pembayaran berkala tidak hanya mempercepat proses administrasi kepabeanan, tetapi juga mendukung pengendalian biaya dalam aktivitas logistik impor perusahaan.

Berdasarkan evaluasi model CIPP, fasilitas pembayaran berkala relevan dengan kebutuhan perusahaan pada aspek context, didukung oleh kesiapan dasar perusahaan pada aspek input, menghasilkan perubahan proses pada aspek process, serta memberikan efisiensi waktu dan biaya pada aspek product. Namun, keberhasilan implementasi ini tetap memerlukan penguatan sistem pengendalian internal. Perusahaan perlu menyusun SOP khusus pembayaran berkala, menetapkan KPI customs clearance, memperkuat monitoring jatuh tempo pembayaran, serta memastikan rekonsiliasi data PIB secara konsisten antara bagian impor dan accounting. Dengan penguatan tersebut, efisiensi yang dihasilkan dari pembayaran berkala dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan.

REFERENSI

- Bank, W. (2018). *Connecting to Compete 2018: Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and its Indicators: Connecting to compete 2018: trade logistics in the global economy - the logistics performance index and its indicators*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/576061531492034646>
- Berata, I. K. O. (2014). *Panduan Praktis Ekspor Impor*. RAS.
- Febriana, N. F., Pambudi, M. A. L., & Maharani, A. (2025). Transformasi Digital Pengelolaan Dokumen Fabric untuk Memaksimalkan Kualitas Layanan Gudang Berikat PT. Sunjaya Mentari Abadi. *Jurnal Transportasi Dan Manajemen Maritim (Transma)*, 1(1), 30–43.
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gani, A. (2017). The Logistics Performance Effect in International Trade. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 33(4), 279–288. <https://doi.org/10.1016/J.AJSL.2017.12.012>
- Hammadi, L., de Cursi, E. S., & Barbu, V. S. (2020). Uncertainty Quantification in Risk Modeling: The Case of Customs Supply Chain. *International Symposium on Uncertainty Quantification and Stochastic Modeling*, 254–270.
- Hardi Fardiansyah, S. E., SH, M. H., Christina Bagenda, S. H., MH, C., Citra Lutfia, S. E., Gita Arasy Harwida, S. E., Melan Sinaga, S. E., Retnaningtyas Widuri, S., MM, B. K. P., & Raida Fuadi, S. E. (2023). *Kepabeanan Dan Beacukai*. Penerbit Widina.
- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). *Perdagangan internasional & strategi pengendalian impor*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Kusnandar, S., & SH, M. H. (n.d.). *Strategi Hukum Dalam Transaksi Bisnis Lintas Batas Perspektif Indonesia (Panduan Komprehensif untuk Melindungi Kepentingan Bisnis di Era Globalisasi)*. Penerbit Adab.

Abdul Najib, Evaluasi Pembayaran Berkala Terhadap Efisiensi Customs Clearance Pada Perusahaan Manufaktur

- NUR, I. (2020). OPTIMALISASI FASILITAS MITRA UTAMA (MITA) KEPABEANAN GUNA MENUNJANG KETEPATAN WAKTU CUSTOM CLEARANCE BARANG IMPOR DI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK. <http://www.library.pip-semarang.ac.id>
- PMK No. 128 Tahun 2023. (n.d.). Retrieved June 30, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283237/pmk-no-128-tahun-2023>
- Priyajati, H. A., & Haryanto, T. (2020). Hubungan Logistik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 9 Negara Emerging Markets Asia. *Media Trend*, 15(1), 133–146.
- Rabbani, D. R. S. (2021). Telaah kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1).
- Rinaldi, D. T., Rahmatunnisa, M., & Chan, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Mitra Utama Kepabeanan Dengan Metode Context, Input, Process, Product. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1–17.
- Rubiyanto, A. (2021a). Pengelolaan Custom Clearance Impor Melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Mitra Segara Cargo Semarang. *Prosiding Seminar Nasional*, 3(1), 199–206.
- Rubiyanto, A. (2021b). Pengelolaan Custom Clearance Impor Melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Mitra Segara Cargo Semarang. *Prosiding Seminar Nasional*, 3(1), 199–206.
- Sarumaha, H., & Rangkuti, S. (2022). Analisis Proses Custom Clearance Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor Dan Impor Pada PT. Bahari Internasional Mandiri. *Jurnal Bisnis Corporate*, 7(2), 66–78.
- Sukarno, S., & Sentana, J. T. (2024). ANALISIS PELAYANAN KHUSUS TERHADAP PREDIKAT MITA KEPABEANAN. *Kajian Akademis BPPK*, 347–375.
- Ukas, U., Husna, L., & Arman, Z. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(02), 14–29.